

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Diponegoro Sidoarjo ialah :

1. Calon apoteker perlu membekali diri sebelum mengikuti kegiatan PKPA dengan ilmu pengetahuan, keterampilan serta percaya diri yang baik sehingga selama berlangsungnya kegiatan PKPA calon apoteker dapat menjalankan tugas dengan baik.
2. Calon apoteker hendaknya aktif melakukan kegiatan kefarmasian saat berlangsungnya kegiatan PKPA sehingga dapat memperoleh informasi yang berguna.
3. Calon apoteker perlu meningkatkan nilai kepedulian kepada pasien sehingga proses pelayanan berlangsung dengan baik.
4. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengendalian untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
5. Calon apoteker perlu berlatih kemampuan untuk berkomunikasi agar kegiatan KIE dapat berlangsung dengan baik.
6. Calon apoteker juga perlu memperhitungkan waktu peracikan dengan baik untuk mencegah pasien menunggu terlalu lama.
7. Sarana dan prasarana yang ada di apotek diharapkan dapat ditingkatkan
8. Petugas kesehatan di apotek diharapkan lebih rutin melakukan kegiatan pendekatan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H.N. 2016, Mengenal Jenis-Jenis Insulin Terbaru untuk Pengobatan Diabetes, *Majalah Farmasetika*, **1(4)**: 1-4.
- Bararah, V.F. 2010, Cara Suntik Insulin Diabetes yang Tepat. Detik Health. Jakarta. Diakses tanggal 11 Juli 2012 dari: <http://health.detik.com/read/2010/08/31/151759/1432059/766/cara-suntik-insulin-diabetes-yang-tepat>.
- BNF staff. 2011, British National Formulary 61, Pharmaceutical Press, London, UK, p. 346.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang *Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Hartini, Y.S. dan Sulasmono. 2007. *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan terkait Apotek Termasuk Naskah dan Apotek Rakyat*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ Per/X/ 2002 *tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380 Tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.

Lacy, C.F. et al. 2010. *Drug Information Handbook* 18th Edition. American Pharmacist Association, USA.

Lacy, C.F. et al. 2010. *Drug Information Handbook* 18th Edition. American Pharmacist Association, USA.

McEvoy, G.K. et al. 2011. *AHFS Drug Information Essentials*. American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.

- Medscape. 2015. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Februari 2019.
- MIMS. 2016. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Februari 2018. Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Nomor 193 Tahun 2012).
- Seto, S., Yunita, N., & Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi edisi ke 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja, 2007, *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi Keenam, 389, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Undang Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2011.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.